

MAKALAH



PENGALAMAN DALAM MENGELOLA INCLUSIVE GOVERNMENT

Oleh:
H.A. Kholiq Arif
Bupati Wonosobo





PENGALAMAN DALAM MENGELOLA INCLUSIVE GOVERNMENT

H.A. KHOLIQ ARIF

Symponi Negeri di Atas Awan



Symponi
Negeri di Atas
Awan



“Batam” - Rabu, 15 April 2015

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Profil Daerah



Luas Wilayah	984,68 km ²
Jumlah Penduduk (Laki-laki 50.81%, Perempuan 49.19%)	771.447 jiwa
Kecamatan	15
Desa	265
Kelurahan	29
Mata pencaharian mayoritas penduduk :	Petani

VISI KABUPATEN WONOSOBO



Visi 2010-2015:
Wonosobo yang lebih
maju dan sejahtera

HAK DASAR TERPENUHI

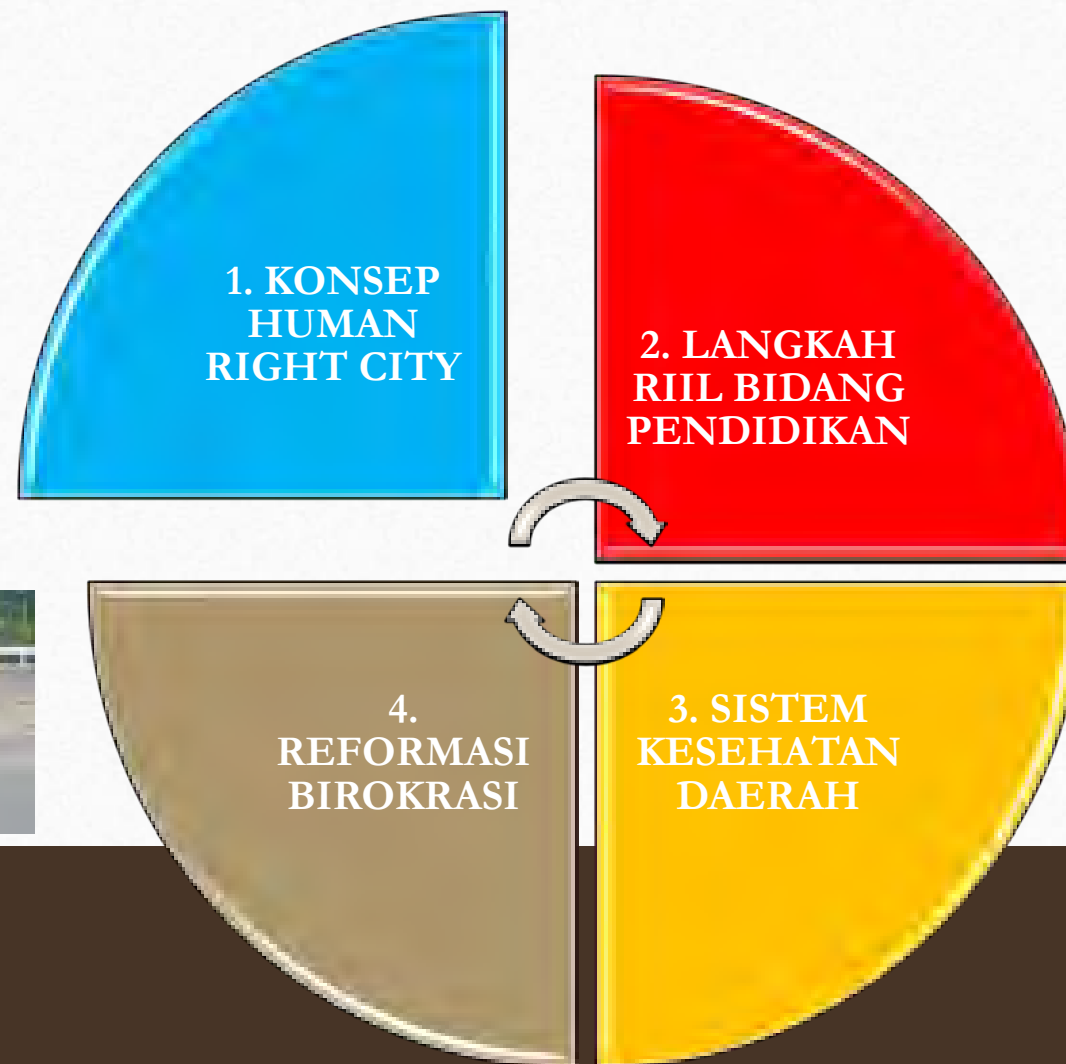
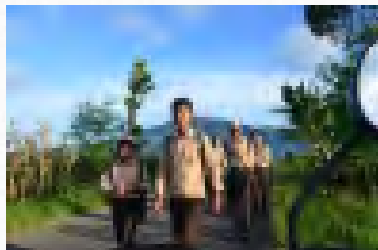
ADA JAMINAN
KEAMANAN

PEMBANGUNAN MANUSIA
SEUTUHNYA

KONDISI EMPIRIK – KAMTIBMAS SEBELUM 2005

01. Kriminalitas tinggi. Tahun 2005 = 72 kasus besar.
02. Investasi rendah (2005 : SIUP Kecil, menengah, besar = Rp.102.221.087.000), tahun 2013 = Rp. 452.279.334.754 atau naik 443 %.
03. Banyaknya pabrik / perusahaan yang tutup (seperti : Dieng Djaya, SSWI)
04. Pembalakan hutan secara liar, diperkirakan mencapai 2.500 ha
05. Transaksi perdagangan di pasar sepi.
06. Pertokoan hanya dibuka sampai jam 9 pagi - 5 sore.
07. Income perhotelan minim, meskipun daerah wisata.
08. Pertetangan kelompok – perkelahihan antar kampung hampir terjadi setiap minggu, dipicu pertunjukan seperti lengger, dangdut, hiburan-hiburan lainnya diberbagai lokasi perkampungan. Bahkan terjadi amuk massa sampai penganiayaan dan pembakaran orang sampai mati.
09. Upaya pengambil alihan asset negara dengan pendekatan premanisme
10. Perbedaan organisasi keagamaan misalnya NU – Muhamadiyah, situasi ini dirasakan saat mundurnya presiden Gus Dur.

BEBERAPA INOVASI – KEBIJAKAN KABUPATEN WONOSOBO





KONSEP HUMAN RIGHT CITY



- Ide besar HAM ini perlu diterjemahkan dari level negara ke posisi/ranah lokal dengan menjadikan kabupaten/kota HAM (*human rights city*). Warga ditempatkan pada posisi terpenting dalam setiap proses pembangunan.
- Salah satu indikator Kota HAM adalah kota yang ramah kepada pejalan kaki dan penyandang difabilitas. Hal ini menyangkut kondisi infrastruktur jalan, trotoar, hingga tata kota yang memihak kepentingan semua kalangan, termasuk warga difabel.
- Anak-anak dan kaum manula akan menerima keramahan dalam akses dengan tersedianya ruang terbuka hijau serta taman-taman bermain yang memadai.



- ❑ Aspek keamanannya kondusif untuk ukuran kehidupan yang nyaman. Sehingga, setiap warga bebas beraktivitas tanpa harus dibayangi ketakutan dan kekhawatiran atas, misalnya, tindak kriminalitas.
- ❑ Indikator lain sebagai syarat *human rights city* adalah perbaikan layanan oleh pemerintah. Praktik pelayanan publik bisa lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan suku, agama - termasuk mazhab/paham dalam beragama-ras, hingga perbedaan warna kulit dan bahasa pun terdorong. Keragaman bukan menjadi masalah, tapi sebaliknya akan menjadi rahmat.
- ❑ Warga negara atau setiap individu dijaga dari ancaman pelanggaran HAM. Baik yang dilakukan negara terhadap warganya maupun antar sesama warga kabupaten/kota tersebut.

LANJUTAN
... Indikator...



LANGKAH RIIL BIDANG PENDIDIKAN (Pendidikan dan Kota Ramah HAM)

1. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama ini terus berupaya dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga masyarakat Wonosobo, melalui kebijakan-kebijakan yang diawali dari proses perencanaan sampai dengan upaya implementasi dan evaluasi.
2. Pemenuhan hak atas pendidikan diwujudkan melalui peningkatan layanan pendidikan mulai jenjang PAUD sampai dengan Sekolah Menengah.
3. Pendirian PAUD *Holistik Integratif* yang sudah dirintis oleh Kabupaten Wonosobo merupakan formulasi yang mampu menjawab permasalahan akses pendidikan sekaligus kesehatan bagi anak usia dini.
4. Peningkatan akses melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi fokus pemerintah Kabupaten Wonosobo utamanya untuk mencapai target Pendidikan Menengah Universal. Skema SMP/SMA/SMK Satu Atap diharapkan mampu menjawab permasalahan untuk akses di bidang pendidikan menengah.



LANJUTAN
PENDIDIKAN...

- 5) Pemetaan dan distribusi guru secara tepat menjadi alternatif untuk menjawab permasalahan rasio guru : murid sehingga setiap siswa dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- 6) Pengembangan kurikulum pendidikan yang memuat nilai-nilai HAM baik melalui pengembangan muatan lokal ataupun terintegrasi dalam mata pelajaran sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai HAM sejak dini pada siswa. Hal ini diawali oleh pemahaman guru mengenai HAM secara komprehensif sebelum ditransfer kepada peserta didik. Lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan sekolah yang Ramah HAM.
- 7) Menjadikan masyarakat dan kelompok masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sehingga setiap warga masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas.



SISTEM KESEHATAN DAERAH

- Konsep baru yang muncul dalam penyusunan Sikesda Kabupaten Wonosobo untuk mendukung Kota Ramah HAM. Diantaranya pembentukan jaringan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dari kabupaten sampai ke tingkat desa dalam bentuk pos UKM desa.
- Sebagai UKM tingkat pertama, Pos UKM desa merupakan unit pelayanan pemerintahan desa yang bertugas menggerakkan pembangunan kesehatan desa dengan dukungan pembiayaan dari desa dan supervisi teknis dari Puskesmas.



LANJUTAN KESEHATAN

- ❑ Sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Siskesda menetapkan proporsi anggaran kesehatan daerah minimal 10 % dari APBD diluar gaji. Anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggaran kesehatan dalam APBD.
- ❑ Alokasi pembiayaan tersebut terutama untuk membiayai UKM serta Unit Kesehatan Perorangan (UKP) bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar yang tidak terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS. Sisanya yang $\frac{1}{3}$ digunakan untuk keperluan belanja modal fasilitas kesehatan perorangan milik Daerah.
- ❑ Pembagian proporsi anggaran yang demikian itu merupakan wujud keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap pelayanan publik bagi warga masyarakatnya.

REFORMASI BIROKRASI DI WONOSOBO

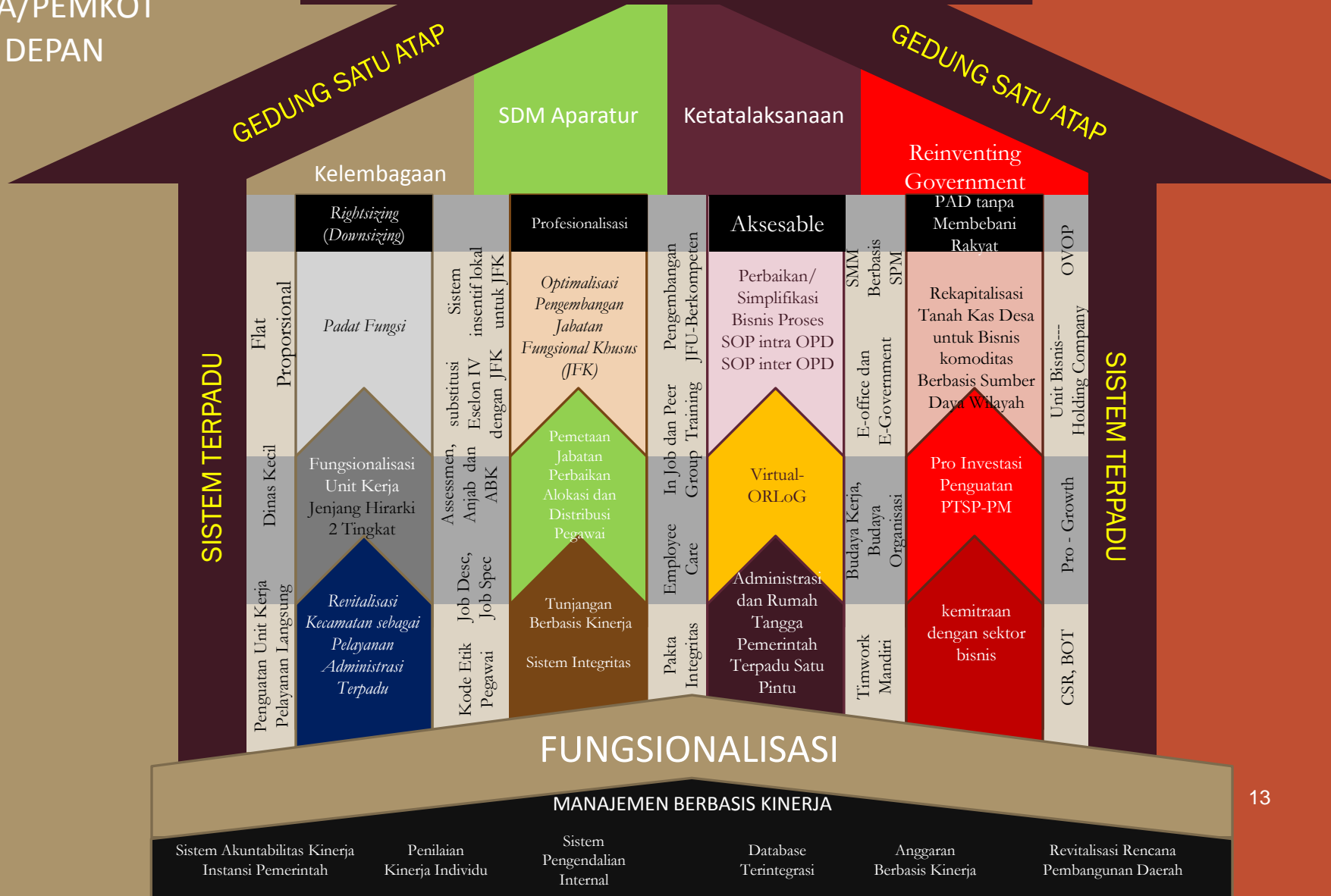
- ❑ Mendorong upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Total
- ❑ Menawarkan prinsip *One Roof Local Government* (ORLoG) secara utuh dengan mengedepankan efektifitas dan optimalisasi potensi pegawai sesuai bidang keahliannya.
- ❑ Menerapkan prinsip reinventing government untuk meningkatkan pendapatan guna menjamin kesejahteraan pegawai.





GAGASAN WONOSOBO
UNTUK
PEMDA/PEMKOT
MASA DEPAN

PEMERINTAH KABUPATEN TERPADU SATU ATAP
One Roof Local Government (ORLoG)



“4” KERANGKA BESAR ORLOG

KELEMBAGAAN –
RIGHTSIZING

SDM APARATUR -
PROFESIONALISASI

KETATALAKSANAAN –
AKSESABLE

REINVENTING
GOVERNMENT – PAD
TANPA MEMBEBANI
RAKYAT



SISTEM HARMONISASI SOSIAL

1. Pemkab menggandeng satuan POLRI dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan Program FKPM yang dalam hal ini merupakan jbaran kegiatan Perpolisian Masyarakat (Polmas), di mana POLRI melakukan *partnership building* dengan stakeholders termasuk pemerintah desa dan masyarakat
2. Pemkab Wonosobo melibatkan stakeholders termasuk masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Melibatkan para Preman dalam akvittas keagamaan dan tradisi budaya. *Kholiq Arif : "Mereka tidak boleh dibuang, kecuali melanggar hak orang lain" (tempo.co.id, 11 Desember 2012)*
4. Memberikan lapangan pekerjaan (bekerja sama dengan pemilik perusahaan).
5. Melakukan "pendekatan kemanusiaan".
6. Menggandeng berbagai kalangan untuk memberikan terapi kepada para preman.

FILOSOFI MEMELIHARA HARMONISASI SOSIAL

AGAMA

LAYYIN
(PENDEKATAN DG
KESOPANAN)

JAWA

• “DIPANGKU MATI”
(SALING
MEMBERIKAN
PERAN SESUAI DG
KEPENTINGANNYA)



HARMONISASI KEBERAGAMAN AGAMA



1. Memberikan rasa aman bagi semua warga pada saat beribadah.
2. Memberikan kemudahan bagi umat beragama yang hendak mendirikan tempat ibadah.
3. Peningkatan peran Forum Kebebasan Umat Beragama (FKUB).

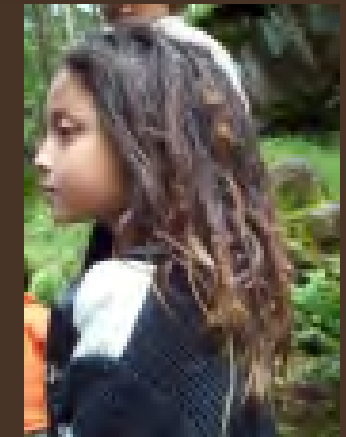


MEMBERI RUANG BAGI MINORITAS

- ❑ Memberikan perlindungan dan kebebasan beribadah kepada golongan minoritas.
- ❑ Melindungi dan memelihara tempat ibadah lintas agama termasuk yang digunakan oleh kelompok/ golongan minoritas.
- ❑ Melanjutkan upaya harmonisasi dengan kelompok minoritas lainnya dengan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan.

TERAPI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT “PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL”

- ❑ Budaya Gotong Royong yang terpelihara hingga saat ini (kerja bhakti);
- ❑ Toleransi beragama dan harmonisasi sosial (kerukunan antar umat beragama dan perlindungan terhadap kaum minoritas);
- ❑ Penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM);
- ❑ Pelestarian tradisi dan pengembangan budaya lokal (Ruwat Rambut Gembel, Lengger, dll);
- ❑ Pembangunan Pro Lingkungan;
- ❑ Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (UMKM).



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KAMTIBMAS



- Pemkab Wonosobo melibatkan stakeholders termasuk masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamling masih dilaksanakan sampai sekarang)
- Mengelola preman menjadi sumber daya melalui:
 - ❑ Melibatkan para preman dalam aktivitas keagamaan dan tradisi budaya. Kholiq Arif : “Mereka tidak boleh dibuang, kecuali melanggar hak orang lain” (tempo.co.id, 11 Desember 2012)
 - ❑ Memberikan lapangan pekerjaan (bekerja sama dengan pemilik perusahaan)
 - ❑ Melakukan “pendekatan kemanusiaan”
 - ❑ Menggandeng berbagai kalangan untuk memberikan terapi kepada para preman.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN KEAMANAN MASYARAKAT

Pemkab menggandeng satuan Polri dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan Program FKPM yang dalam hal ini merupakan jbaran kegiatan Perpolisian Masyarakat (Polmas), di mana Polri melakukan *partnership building* dengan stakeholders termasuk pemerintah desa dan masyarakat

Output : 1 desa/kelurahan 1 Polisi
Struktur FKPM :
Ketua : Tokoh Masyarakat
Wakil : Petugas Kepolisian
Anggota : Warga Masyarakat

MEMBENTUK FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT (FKPM)



Lanjutan...

Inti kegiatan FKPM :

- a. Menjalinkan kerjasama antar polisi dengan masyarakat
 - b. Memberikan fasilitas untuk menangani & menyelesaikan konflik sosial yang ada
 - c. Memberikan kesempatan masyarakat berperan dalam kamtibmas
- ❑ Tujuan FKPM: Menampung, setiap permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban sosial yang terjadi di desa yang membutuhkan penyelesaian tanpa harus ke ranah hukum
 - ❑ Dalam kegiatan FKPM, menjadikan Polisi memiliki kedudukan yang sejajar dengan masyarakat



ALUR PENANGANAN PERMASALAHAN



- ❑ Jika ada persoalan/ konflik masyarakat terkait agama/ kepercayaan/ tradisi, FKPM akan mengundang FKUB dan forum/ormas lain yang terkait
- ❑ FKPM Kabupaten Wonosobo berhasil menduduki **Peringkat II Tingkat Provinsi Jawa Tengah** pada Lomba FKPM dalam rangka HUT Bhayangkara tahun 2013 melalui FKPM Desa Kalimendong Leksono.

OPTIMALISASI LINMAS DALAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI WILAYAH



JUMLAH TOTAL ANGGOTA LINMAS KABUPATEN WONOSOBO : 8.214 ORG

TERDIRI DARI :

- ❑ Linmas Kabupaten : 65 orang
- ❑ Linmas Inti 30 org/kecamatan : 150 org
- ❑ Linmas Desa/Kelurahan : 7999 org



Kesepakatan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk Kerukunan Hidup Beragama

Kesepakatan Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat bersama Daerah dalam rangka Memantapkan Kerukunan Hidup Beragama dan Bermasyarakat menuju Wonosobo yang Lebih Maju dan Sejahtera.





Pertemuan rutin FKUB

- Melaksanakan pertemuan lintas agama secara rutin.
- Melakukan komunikasi secara intensif terkait pemeliharaan kerukunan dan peningkatan kualitas moral dan pendidikan karakter bagi masyarakat.
- Berupaya menyukseskan program peningkatan kualitas hidup masyarakat (Senja Keluarga).

PELIBATAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA DAN KEPERCAYAAN DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBANGUNAN

1. Perencanaan pembangunan (Musrenbang).
2. Program Pemeliharaan, Penyelamatan, dan Pemulihan Lingkungan.
3. Program Senja Keluarga.
4. Program Penataan Kota dan Kebersihan Lingkungan.
5. Program Kesbangpol dan Linmas.
6. Program Pendidikan Karakter.
7. Program Pembinaan Kepemudaan.
8. Program Kesehatan Masyarakat.
9. Program KEBUN BIBIT TENTARA, dll.



Bupati Wonosobo menanam bersama Ahmadiyah, Muslimat NU, Muhamadiyah dan komunitas non-muslim di Bukit Maria Kapencar Kertek

APRESIASI TERHADAP PLURALISME



- ❑ Penghargaan dari Jaringan Antar Iman Indonesia (JAI) sebagai “TOKOH PLURALISME” untuk Bupati Wonosobo diberikan di Jayapura Papua 19-23 Mei 2014 (bersama Gubernur Kalsel dan Gubernur DIY).
- ❑ Harmonisasi sosial yang tergambar dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Wonosobo mendapat perhatian dari Konselor Politik Kedutaan Amerika untuk Indonesia Mr. Ted Lynk yang sengaja datang secara pribadi ingin menggali informasi lebih dalam terkait kerukunan umat beragama dan pluralisme di Wonosobo.



Daerah Terbaik di-Indonesia
“Sindo Government Award”



“Jika sebuah negara tidak mengenali hak kaum minoritas dan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, kita tidak akan mempunyai kestabilan dan kesejahteraan yang bisa saja dimiliki”